

PENGARUH KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH, DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI ACEH

Fara Diba Gustiani¹, Ali Imran², Zulkarnaini³

^{1,2,3}Politeknik Negeri Lhokseumawe

Email : faradiba.gustiani@gmail.com¹, ali.imr4n@gmail.com², zulkarnaini@pnl.ac.id³

Abstrak

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya publik, sehingga diperlukan pengelolaan pelaporan keuangan, kemandirian fiskal, dan belanja modal yang optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Kualitas Pelaporan Keuangan, Kemandirian Keuangan Daerah, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kausal dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan berupa data sekunder dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh periode 2019–2023, yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan dianalisis menggunakan regresi data panel dengan Random Effect Model (REM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualitas Pelaporan Keuangan, Kemandirian Keuangan Daerah, dan Belanja Modal secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Ketiga variabel tersebut juga secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, dengan nilai R^2 sebesar 0,250 atau 25%. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelaporan, kemandirian fiskal, dan pengelolaan belanja modal dapat mendukung peningkatan kinerja keuangan daerah. Implikasinya, pemerintah daerah perlu memperkuat kualitas pelaporan, mengurangi ketergantungan fiskal, dan mengoptimalkan belanja modal secara efektif dan tepat sasaran.

Kata Kunci: Kualitas Pelaporan Keuangan, Kemandirian Keuangan Daerah, Belanja Modal, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Abstract

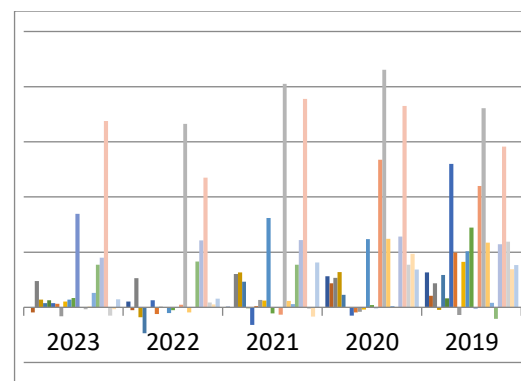
Local government financial performance is a crucial indicator for assessing the effectiveness and efficiency of public resource management; thus, optimal management of financial reporting, fiscal independence, and capital expenditure is essential. This study aims to analyze the impact of Financial Reporting Quality, Regional Financial Independence, and Capital Expenditure on the financial performance of regency and city governments in Aceh Province, both partially and simultaneously. A causal research design with a quantitative approach was employed. The study utilized secondary data from the Local Government Financial Reports (LKPD) of 23 regencies/cities in Aceh Province for the 2019–2023 period; data were collected via documentation techniques and analyzed using panel data regression with the Random Effect Model (REM). The results indicate that Financial Reporting Quality, Regional Financial

Independence, and Capital Expenditure each have a positive and significant partial effect on local government financial performance. These three variables also exert a significant simultaneous effect on financial performance, with an R^2 value of 0.250 (25%). These findings suggest that enhancing reporting quality, fiscal independence, and capital expenditure management can support improved regional financial performance. Consequently, local governments need to strengthen reporting quality, reduce fiscal dependency, and optimize capital expenditure effectively and in a targeted manner.

Keywords: *Financial Reporting Quality, Regional Financial Independence, Capital Expenditure, Local Government Financial Performance.*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk mengelola urusan pemerintahan, termasuk sumber pendapatan dan alokasi belanja daerah (Agus, 2019). Kewenangan tersebut menuntut pemerintah daerah mampu mengelola keuangan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Kinerja keuangan menjadi salah satu indikator penting untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan tersebut. Dalam konteks Provinsi Aceh, karakteristik fiskal dan kemampuan keuangan yang berbeda antar kabupaten dan kota menyebabkan kinerja keuangan daerah menunjukkan variasi yang perlu dikaji lebih lanjut (Satria & Imsar, 2025).



Gambar 1.1. Grafik Surplus dan Defisit Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Periode 2019–2023

Kondisi tersebut terlihat pada Gambar 1.1 Grafik Surplus dan Defisit Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Periode 2019–2023. Grafik menunjukkan adanya variasi kondisi anggaran antarwilayah dan antarperiode, dengan beberapa pemerintah daerah mengalami surplus yang relatif stabil, sedangkan daerah lainnya mengalami defisit pada periode tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah belum merata dan tidak hanya ditentukan oleh besarnya

pendapatan, tetapi juga berkaitan dengan kualitas pelaporan keuangan, tingkat kemandirian keuangan, serta efektivitas pengelolaan belanja modal.

Grafik tersebut memperlihatkan variasi kondisi anggaran sebagai gambaran awal pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang lebih optimal. Dalam hal ini, kualitas pelaporan keuangan diperlukan untuk menyediakan informasi yang andal mengenai kondisi keuangan dan kinerja anggaran (Galih dkk., 2024), sementara kemandirian keuangan mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahan dengan mengurangi ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat. Selain itu, belanja modal merupakan bentuk investasi pemerintah daerah yang diarahkan pada penyediaan aset dan infrastruktur untuk mendukung pelayanan publik serta pembangunan daerah.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang belum sepenuhnya konsisten. Nur dan Suwardi (2024) menemukan bahwa kemandirian daerah, efektivitas PAD, dan pengelolaan belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah, sedangkan penelitian Rimenda dkk. (2025) menunjukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan

terhadap kinerja keuangan. Selain itu, penelitian sebelumnya menempatkan kualitas pelaporan keuangan sebagai variabel dengan posisi yang berbeda, yaitu sebagai variabel dependen maupun variabel moderasi. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menempatkan Kualitas Pelaporan Keuangan sebagai variabel independen yang diuji bersama kemandirian keuangan daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan permasalahan dan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini mempertanyakan: apakah Kualitas Pelaporan Keuangan, Kemandirian Keuangan Daerah, dan Belanja Modal berpengaruh secara parsial maupun simultan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh? Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi empiris dalam pengembangan kajian akuntansi sektor publik, khususnya mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, sekaligus memberikan dasar evaluasi bagi pemerintah kabupaten

dan kota di Provinsi Aceh dalam meningkatkan kualitas pelaporan, memperkuat kemandirian fiskal, dan mengoptimalkan belanja modal.

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah

Kinerja keuangan pemerintah daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik secara efektif, efisien, serta akuntabel. Kinerja keuangan menjadi salah satu indikator dalam mengevaluasi keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan dan belanja yang dimilikinya. Pengelolaan keuangan yang baik menunjukkan kemampuan pemerintah dalam menggunakan sumber daya secara optimal untuk mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat (Noviana & Dito, 2024).

Dalam penelitian ini, kinerja keuangan pemerintah daerah diukur menggunakan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, yaitu perbandingan antara realisasi belanja daerah dan realisasi pendapatan daerah. Rasio tersebut dihitung dengan rumus:

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah =

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100$$

Semakin rendah nilai rasio efisiensi, semakin efisien pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya. Sebaliknya, rasio yang tinggi menunjukkan bahwa belanja daerah relatif besar dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh (Yusrina dkk., 2023).

B. Kualitas Pelaporan Keuangan

Kualitas pelaporan keuangan menunjukkan tingkat keandalan dan kesesuaian penyajian informasi keuangan pemerintah daerah berdasarkan standar dan ketentuan yang berlaku. Laporan keuangan yang berkualitas dapat memberikan informasi yang relevan dan dapat digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban serta pengambilan keputusan. Dalam konteks pemerintah daerah, kualitas pelaporan keuangan juga berkaitan dengan kondisi pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Zahwah, 2025).

Pengukuran kualitas pelaporan keuangan dalam penelitian ini menggunakan jumlah temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang tercantum dalam Laporan Hasil

Pemeriksaan (LHP). Temuan audit mencerminkan adanya kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap peraturan, atau permasalahan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan. Variabel ini menggunakan skala rasio berdasarkan jumlah temuan audit, di mana semakin tinggi jumlah temuan audit menunjukkan kualitas pelaporan keuangan yang semakin rendah, sedangkan semakin sedikit temuan menunjukkan kualitas pelaporan keuangan yang lebih baik (Zahwah, 2025).

C. Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan dengan mengandalkan sumber pendapatan yang berasal dari daerah sendiri. Tingkat kemandirian yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kapasitas fiskal yang lebih baik dan tidak terlalu bergantung pada bantuan atau dana transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, kemandirian keuangan menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah (Avinda & Eni, 2021; Silvia & Nurul, 2024).

Dalam penelitian ini, kemandirian keuangan daerah diukur menggunakan

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, yaitu perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan total pendapatan daerah. Pengukurannya dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100$$

Semakin tinggi rasio yang diperoleh, semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan daerah melalui sumber pendapatan sendiri dan semakin kuat tingkat kemandirian fiskalnya.

D. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk memperoleh atau menambah aset tetap yang memberikan manfaat dalam jangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur, pengadaan peralatan, dan penyediaan sarana serta prasarana publik. Alokasi belanja modal mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan serta meningkatkan kapasitas pelayanan publik. Belanja modal yang dikelola secara tepat dan produktif dapat mendukung peningkatan kualitas aset daerah dan kinerja keuangan pemerintah

daerah (Rimenda dkk., 2025; Sari dkk., 2024).

Dalam penelitian ini, belanja modal diukur menggunakan Rasio Belanja Modal, yaitu perbandingan antara total belanja modal dan total belanja daerah. Rumus pengukurannya adalah:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100$$

Rasio yang lebih tinggi menunjukkan proporsi alokasi anggaran yang lebih besar untuk investasi dan pembangunan jangka panjang. Sebaliknya, rasio yang rendah menunjukkan bahwa struktur belanja daerah lebih banyak dialokasikan pada belanja selain belanja modal (Sari dkk., 2024)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian kausal untuk menganalisis pengaruh Kualitas Pelaporan Keuangan, Kemandirian Keuangan Daerah, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel, yang menggabungkan data lintas daerah (cross-section) dan runtut waktu (time series). Objek penelitian adalah pemerintah

kabupaten dan kota di Provinsi Aceh dengan data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) periode 2019–2023.

Populasi penelitian mencakup seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Aceh yang menyusun dan mempublikasikan LKPD secara lengkap selama periode pengamatan, terdiri atas 18 kabupaten dan 5 kota atau sebanyak 23 pemerintah daerah. Dengan demikian, penelitian menggunakan 23 kabupaten/kota sebagai unit penelitian selama periode 2019–2023. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari LKPD dan publikasi resmi instansi terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi untuk memperoleh data Kualitas Pelaporan Keuangan, Kemandirian Keuangan Daerah, Belanja Modal, dan Kinerja Keuangan, serta studi kepustakaan sebagai pendukung penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan EViews 13.0 melalui tahapan pemilihan model regresi data panel, pengujian asumsi klasik, dan pengujian hipotesis secara parsial maupun simultan. Pemilihan model dilakukan melalui Uji Chow, Uji Hausman, dan Lagrange Multiplier, yang menghasilkan

Random Effect Model (REM) sebagai model estimasi yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya, pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial dan pengaruh ketiganya secara simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian. Analisis ini meliputi nilai rata-rata (mean), nilai tengah (median), nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan data panel dari 23 pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Aceh selama periode 2019–2023, sehingga jumlah observasi yang digunakan sebanyak 115 data.

Tabel 1

Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

	N	Mean	Maximum	Minimum	SD
Kualitas Pelaporan Keuangan	115	15,29	25,00	8,00	3,55
Kemandirian Keuangan Daerah	115	15,86	36,25	4,78	5,36
Belanja Modal	115	17,78	32,73	5,57	6,12
Kinerja Keuangan PEMDA	115	91,38	113,33	64,26	11,39

Sumber: Hasil olah data dengan Eviews 13.0

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif terhadap 115 observasi data panel

periode 2019–2023, diperoleh gambaran karakteristik data sebagai berikut:

1. **Kualitas Pelaporan Keuangan (X1):** Memiliki nilai minimum sebesar 8, yang terjadi pada Kabupaten Aceh Besar tahun 2023 dan Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2021. Nilai maksimum sebesar 25, terjadi pada Kabupaten Aceh Jaya tahun 2023, dengan nilai *mean* sebesar 15,28696 dan standar deviasi sebesar 3,551044.
2. **Kemandirian Keuangan Daerah (X2):** Memiliki nilai minimum sebesar 4,775630, terjadi di Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2022, dan nilai maksimum sebesar 36,24913, terjadi di Kota Banda Aceh tahun 2022. Variabel ini memiliki nilai *mean* sebesar 15,86258 dan standar deviasi sebesar 5,363321.
3. **Belanja Modal (X3):** Memiliki nilai minimum sebesar 5,571940, terjadi di Kabupaten Aceh Besar tahun 2023, sedangkan nilai maksimum sebesar 32,73102, terjadi di Kabupaten Nagan Raya tahun 2019. Nilai *mean* belanja modal sebesar 17,78009 dengan standar deviasi sebesar 6,118918.

4. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y):

Memiliki nilai minimum sebesar 64,25930, terjadi di Kabupaten Pidie tahun 2021, dan nilai maksimum sebesar 113,3306, terjadi di Kota Subulussalam tahun 2022. Variabel kinerja keuangan pemerintah daerah memiliki nilai *mean* sebesar 91,37941 dan standar deviasi sebesar 11,38975.

2. Uji Chow

Uji Chow dilakukan untuk menentukan model regresi data panel yang paling sesuai antara Common Effect Model (CEM) dan Fixed Effect Model (FEM). Hasil pengujian menunjukkan nilai Cross-section F sebesar 4,503616 dengan nilai probabilitas 0,0000. Karena nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka H_0 ditolak dan model yang lebih tepat adalah Fixed Effect Model (FEM).

Tabel 2

Chow Test untuk Menentukan CEM atau FEM

Cross-Section F	Prob.	Keputusan
4,503	0,000	Fixed Effect Model (FEM)

Sumber: Hasil olah data dengan Eviews 13.0

Berdasarkan hasil tersebut, model Fixed Effect lebih sesuai dibandingkan Common Effect Model. Oleh karena itu, pengujian dilanjutkan dengan Uji Hausman

untuk menentukan model yang paling tepat antara Fixed Effect Model dan Random Effect Model.

3. Uji Hausman

Uji Hausman dilakukan untuk memilih model terbaik antara Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM). Hasil pengujian menunjukkan nilai Chi-Square sebesar 1,764651 dengan nilai probabilitas sebesar 0,6227. Nilai probabilitas tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga H_0 diterima dan model yang dipilih adalah Random Effect Model (REM).

Tabel 3

Hausman Test untuk Menentukan FEM atau REM

χ^2	Prob.	Kesimpulan
1,764	0,622	Random Effect Model (REM)

Sumber: Hasil olah data dengan Eviews 13.0

Dengan demikian, hasil Uji Hausman menunjukkan bahwa Random Effect Model lebih sesuai digunakan dalam penelitian ini dibandingkan Fixed Effect Model.

4. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji Lagrange Multiplier dilakukan untuk menentukan model yang lebih

sesuai antara Common Effect Model (CEM) dan Random Effect Model (REM). Berdasarkan hasil pengujian Breusch-Pagan, diperoleh nilai sebesar 36,22653 dengan probabilitas cross-section sebesar 0,0000. Karena nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka Common Effect Model ditolak dan Random Effect Model dipilih.

Tabel 4

Lagrange Multiplier Test untuk Menentukan FEM atau REM

Cross-Section	Prob.	Keputusan
0,0000	0,0000	Random Effect Model (REM)

Sumber: Hasil olah data dengan Eviews 13.0

Berdasarkan keseluruhan pengujian pemilihan model, Uji Chow menunjukkan Fixed Effect Model, sedangkan Uji Hausman dan Uji Lagrange Multiplier menunjukkan Random Effect Model. Oleh karena itu, model yang digunakan dalam analisis penelitian ini adalah Random Effect Model (REM).

5. Hasil Analisis Regresi Data Panel

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Data Panel

Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 04/28/26 Time: 09:55
 Sample: 2019 2023
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 23
 Total panel (balanced) observations: 115

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-4.872749	0.078245	-62.27582	0.0000
Kualitas Pelaporan Keuangan X ₁	0.006150	0.002686	2.289444	0.0239
<u>Kemandirian Keuangan Daerah</u> X ₂	0.005806	0.002772	2.094464	0.0385
<u>Belanja</u> Modal X ₃	0.010118	0.001735	5.831502	0.0000
Effects Specification				
		S.D.	Rho	
Cross-section random		0.081608	0.4372	
Idiosyncratic random		0.092584	0.5628	
Weighted Statistics				
R-squared	0.250231	Mean dependent var	-2.039106	
Adjusted R-squared	0.229967	S.D. dependent var	0.104918	
S.E. of regression	0.092067	Sum squared resid	0.940879	
F-statistic	12.34855	Durbin-Watson stat	1.678933	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.180649	Mean dependent var	-4.506725	
Sum squared resid	1.624249	Durbin-Watson stat	0.972556	

Sumber: Hasil olah data dengan Eviews 13.0

Berdasarkan tabel diatas maka diperoleh persamaan langsung hasil regresi sebagai berikut:

$$Y = -4,872 + 0,006 X_1 + 0,005 X_2 + 0,010 X_3$$

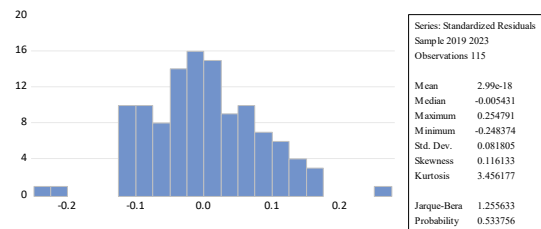
Secara statistik, nilai-nilai dalam persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Konstanta sebesar -4,872 menunjukkan nilai prediksi untuk rata-rata Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah jika semua variabel bebas yaitu Kualitas Pelaporan Keuangan, Kemandirian

Keuangan Daerah dan Belanja Modal secara simultan.

- 2) Koefisien regresi untuk variabel Kualitas Pelaporan Keuangan yaitu sebesar 0,006 dan bernilai positif, artinya setiap terjadi peningkatan nilai Kualitas Pelaporan Keuangan dengan asumsi variabel bebas yang lainnya dalam kondisi konstan, diprediksikan akan meningkatkan nilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 0,006.
- 3) Koefisien regresi untuk variabel Kemandirian Keuangan Daerah yaitu sebesar 0,005 dan bernilai positif, artinya setiap terjadi peningkatan nilai kemandirian keuangan daerah dengan asumsi variabel bebas yang lainnya dalam kondisi konstan, diprediksikan akan meningkatkan nilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 0,005.
- 4) Koefisien regresi untuk variabel Belanja Modal yaitu sebesar 0,010 dan bernilai positif, artinya setiap terjadi peningkatan nilai belanja modal dengan asumsi variabel bebas yang lainnya dalam kondisi konstan, diprediksikan akan meningkatkan nilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 0,010.

6. Uji Normalitas



Gambar 2. Hasil Pengujian Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah residual dalam model regresi berdistribusi normal. Pengujian menggunakan metode Jarque-Bera menunjukkan nilai Jarque-Bera sebesar 1,255633 dengan nilai probabilitas sebesar 0,533756. Karena nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka residual dalam model regresi dinyatakan berdistribusi normal.

7. Uji Multikolineritas

Tabel 6
Hasil Pengujian Multikolineritas

<u>Variabel</u>	<u>VIF</u>
<u>Kualitas Pelaporan Keuangan</u>	1,035
<u>Kemandirian Keuangan Daerah</u>	1,019
<u>Belanja Modal</u>	1,055

Sumber: Hasil olah data dengan EvIEWS 13.0

Uji multikolineritas dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan yang tinggi antarvariabel independen. Pengujian dilakukan menggunakan nilai Centered

Variance Inflation Factor (VIF). Model dinyatakan bebas dari multikolinearitas apabila nilai VIF kurang dari 10. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh variabel memiliki nilai Centered VIF di bawah 10. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model regresi penelitian ini.

8. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 7

Hasil Pengujian Asumsi Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: <u>Glejser</u>			
Null hypothesis: Homoskedasticity			
F-statistic	1.419025	Prob. F(3,111)	0.2410
<u>Obs</u> *R-squared	4.247580	Prob. Chi-Square(3)	0.2359
Scaled explained SS	4.477210	Prob. Chi-Square(3)	0.2143

Sumber: Hasil olah data dengan EViews 13.0

Uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan metode Glejser untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians residual dalam model regresi. Hasil pengujian menunjukkan nilai ObsR-squared* sebesar 4,247580 dengan probabilitas Chi-Square sebesar 0,2359. Karena nilai probabilitas sebesar 0,2359 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak

mengalami gejala heteroskedastisitas atau memiliki varians residual yang homogen.

9. Uji Simultan (F)

Uji simultan dilakukan untuk mengetahui apakah Kualitas Pelaporan Keuangan, Kemandirian Keuangan Daerah, dan Belanja Modal secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil pengujian menunjukkan nilai Fhitung sebesar 12,348, lebih besar daripada Ftabel sebesar 2,686, dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000.

Tabel 8

Hasil Pengujian Hipotesis Simultan (Uji F)

Model	Fhitung	Ftabel	A	P	Keputusan	Kesimpulan
X ₁ , X ₂ , X ₃ → Y	12,348	2,686	0,05	0,0000	H ₀ diterima	Signifikan

Sumber: Hasil olah data dengan Eviews 13.0

10. Uji Parsial (t)

Uji parsial dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil pengujian menggunakan taraf signifikansi 5% dengan nilai ttabel sebesar 1,982.

Tabel 4.13
Rekapitulasi Pengujian Hipotesis Parsial
(Uji t)

Model	thitung	ttabel	A	P	Keputusan	Kesimpulan
$X_1 \rightarrow Y$	2,289	1,982	0,05	0,0239	H1 diterima	Signifikan
$X_2 \rightarrow Y$	2,094	1,982	0,05	0,0385	H2 diterima	Signifikan
$X_3 \rightarrow Y$	5,831	1,982	0,05	0,0000	H3 diterima	Signifikan

Berdasarkan hasil tersebut, Kualitas Pelaporan Keuangan memiliki nilai thitung sebesar 2,289 dengan probabilitas 0,0239, sehingga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Selanjutnya, Kemandirian Keuangan Daerah memiliki nilai thitung sebesar 2,094 dengan probabilitas 0,0385, sehingga juga berpengaruh positif dan signifikan. Sementara itu, Belanja Modal memiliki nilai thitung sebesar 5,831 dengan probabilitas 0,0000 dan menjadi variabel dengan nilai pengaruh statistik paling kuat berdasarkan nilai t-statistic di antara ketiga variabel penelitian. Dengan demikian, seluruh hipotesis parsial dalam penelitian ini diterima karena masing-masing variabel memiliki nilai probabilitas di bawah 0,05.

11. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Berdasarkan hasil Random Effect Model, diperoleh nilai R-squared sebesar 0,250231

atau sekitar 25%, sedangkan nilai Adjusted R-squared sebesar 0,229967.

Tabel 4.15
Hasil Pengujian Koefisien Determinasi

R-squared	0.250231
Adjusted R-squared	0.229967

Nilai R-squared sebesar 25% menunjukkan bahwa variabel Kualitas Pelaporan Keuangan, Kemandirian Keuangan Daerah, dan Belanja Modal mampu menjelaskan variasi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh sebesar 25%. Sementara itu, sebesar 75% sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

12. Pengaruh Kualitas Pelaporan Keuangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Kualitas Pelaporan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, yang ditunjukkan oleh nilai t-statistic sebesar 2,289444 dengan probabilitas $0,0239 < 0,05$ dan koefisien regresi sebesar 0,006150, sehingga H_1 diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin

baik kualitas pelaporan keuangan, maka semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah daerah karena informasi keuangan yang berkualitas dapat mendukung proses perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengambilan keputusan secara lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Dengan demikian, peningkatan kualitas pelaporan keuangan dapat mendukung peningkatan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh selama periode 2019–2023.

13. Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, dengan nilai t-statistic sebesar 2,094464, probabilitas $0,0385 < 0,05$, dan koefisien regresi sebesar 0,005806, sehingga H_2 diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah, maka semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah daerah karena kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan dan kegiatan pemerintahannya melalui sumber daya yang dimiliki dapat memberikan fleksibilitas dalam mengelola anggaran serta

menentukan prioritas pembangunan secara lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas fiskal dan kemandirian keuangan daerah dapat mendukung peningkatan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh.

14. Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, dengan nilai t-statistic sebesar 5,831502, probabilitas $0,0000 < 0,05$, dan koefisien regresi sebesar 0,010118, sehingga H_3 diterima. Nilai koefisien tersebut merupakan yang terbesar dibandingkan variabel independen lainnya, yang menunjukkan bahwa belanja modal memiliki kontribusi relatif lebih besar dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi belanja modal yang dikelola secara efektif dapat mendukung pembangunan infrastruktur, penyediaan aset dan fasilitas pelayanan publik, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan Kinerja

Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Kualitas Pelaporan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
4. Secara simultan, Kualitas Pelaporan Keuangan, Kemandirian Keuangan Daerah, dan Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh.
5. Ketiga variabel tersebut mampu menjelaskan 25% variasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan 75% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian.

Saran

Disarankan untuk menambahkan variabel lain yang dapat memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah karena

ketiga variabel dalam penelitian ini hanya mampu menjelaskan sebesar **25%**, sedangkan **75%** lainnya dipengaruhi oleh faktor di luar penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, A. R. (2019). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Sosfilkom : Jurnal Sosial, Filsafat Dan Komunikasi*, Vol. 13 No. 01, hal. 1–15.
- Avinda, R. G., & Eni, W. (2021). Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Perspektif Kinerja Keuangan (Studi Pada Kota Mojokerto). *Jurnal Akuntansi Akunesa*, Vol. 9 No. 3, hal. 77–86.
- Galih, S., Kusminaini, A., & Septa, A. D. (2024). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pada Bapenda Kota Palembang. *Jurnal Riset Akuntansi Trididanti (Jurnal Ratri)*, Vol. 5 No. 2, hal. 143–155.
- Noviana, H. S., & Dito, N. D. A. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

- Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, Vol. 24 No. 2, hal. 157–170.
- Nur, A. S., & Suwardi, H. B. (2024). Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, Dan Pengelolaan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, Vol. 18 No. 1, hal. 41.
- Rimenda, S. T., Ira, M. G., & Syarif, H. M. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanjamodal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kalimantan Barat. *Jurnal Ilmiah Mea (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, Vol. 9 No. 2, hal. 2862–2873.
- Sari, Y., Meti, Z., & Sasiska, R. (2024). Pengaruhpendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Perimbangan Dan Belanjamodal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota Di Provinsi Sumatera. *Jurnal Riset Akuntansi Tridinanti*, Vol. 6 No. 1, hal. 13–29.
- Satria, S. S. L., & Imsar. (2025). Analisis Efektivitas Administrasi Pembangunan Dalam Mengelola Anggaran Daerah Untuk Pembangunan Ekonomi Lokal. *Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, Vol. 3 No. 5, hal. 34–41.
- Silvia, F. P., & Nurul, H. (2024). Analisis Rasio Efektivitas Pad, Efisiensi PAD Dan Kemandirian Kota Surabaya. *Journal Of Economics*, Vol. 4 No. 3, hal. 98–104.
- Zahwah, J. A. (2025). Pengaruh Temuan Audit Dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023). *Indonesian Accounting Research Journal*, Vol. 6 No. 1, hal 62–70.